BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan hasil penelitian "Analisis Kecenderungan Partisipasi Politik Siswa SMA sebagai Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Sumedang (Studi Kasus di SMA Negeri 3 Sumedang)", dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula masih dinamis dan belum sepenuhnya stabil. Meski banyak siswa manyadari pentingnya pemilu dan hak suara, keterlibatan aktif mereka dalam aktivitas politik masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman demokrasi secara normatif dan praktik partisipatif di lapangan. Faktor-faktor seperti pemahaman pemilu, minat politik, dan kepercayaan terhadap institusi politik sangat mempengaruhi kesiapan siswa untuk berpartisipasi. Lingkungan sosial seperti keluarga, guru, dan media sosial juga turut membentuk sikap mereka. Meski media sosial menyediakan sebagian siswa terpapar informsai tidak akurat. Secara umum, siswa masih berada dalam fase transisi dari ketidakpedulian menuju keterlibatan yang sangat bergantung pada kualitas pendidikan politik yang mereka terima.

5.1.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan hasil temuan yang telah dianalisis, dapat ditarik beberapa kesimpulan khusus yang menggambarkan secara lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan partisipasi politik siswa. Untuk itu, berikut ini disajikan uaraian simpulan khusus dari masing-masing variabel yang telah diteliti:

5.1.2.1 Pengaruh Tingkat Pemahaman Mengenai Pemilu terhadap Kecenderungan Niat untuk Memilih pada Siswa SMA

Siswa yang memahami proses dan pentingnya pemilu cenderung menunjukkan niat untuk memilih yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pemahaman yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman politik bukan hanya mencerminkan kesadaran terhadap hak dan

kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menjadi landasan utama dalam membentuk motivasi untuk berpartisipasi.

5.1.2.2 Pengaruh Minat Politik terhadap Kecenderungan Partisipasi Politik Siswa SMA

Partisipasi politik siswa cenderung dipengaruhi oleh tingkat minat politik yang beragam. Ketertarikan yang tidak seragam ini mencerminkan bahwa pemahaman dan keterlibatan siswa dalam isu politik tidak dapat digeneralisasi karena dibentuk oleh berbagai latar belakang dan pengalaman. Perbedaan ini menunjukkan bahwa strategi pendidikan politik dan sosialisasi pemilu perlu dirancang secara adaptif agar dapat menjangkau seluruh siswa secara merata.

5.1.2.3 Pengaruh Tingkat Kepercayaan pada Lembaga Politik terhadap Kecenderungan Partisipasi Politik Siswa SMA

Partisipasi politik siswa tidak sepenuhnya ditentukan oleh tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga politik. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran akan pentingnya hak pilih dan tanggung jawab sebagai warga negara menjadi dorongan utama yang melampaui rasa skeptis terhadap sistem. Sikap ini menunjukkan bahawa siswa tidak bersikap apatis, melainkan mulai mengembangkan partisipasi politik yang kritis dengan tetap terlibat sambil mempertanyakan kualitas sistem yang ada.

5.1.2.4 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Umum terhadap Kecenderungan Partisipasi Politik Siswa SMA

Partisipasi politik siswa sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan mereka terhadap demokrasi. Siswa yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap sistem demokrasi cenderung lebih aktif menggunakan hak pilih dan terlibat dalam proses pemilu. Meski demikian, tren ini tidak bersifat tetap namun peningkatan pendidikan politik, peran media sosial, dan keterlibatan politisi yang lebih responsif dapat menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan serta meningkatkan partisipasi politik generasi muda.

5.1.2.5 Pengaruh Sikap Toleransi Etnis terhadap Kecenderungan Partisipasi

Politik pada Siswa SMA

Kecenderungan partisipasi politik siswa sangat dipengaruhi oleh tingkat

sikap toleransi etnis yang mereka miliki. Sikap toleran membukan ruang bagi

siswa untuk lebih terlibat dalam dinamika sosial-politik melalui akses informasi,

interaksi yang inklusif, dan pengalaman yang mendorong keterlibatan aktif.

Ketika toleransi berkembang, siswa lebih mudah memahami dan menghargai

perbdeaan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan minat mereka

terhadap proses demokrasi, termasuk pemilu.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dijabarkan sebelumnya,

bagian ini akan menguraikan berbagai implikasi yang muncul, baik secara teoritis

maupun praktis:

5.2.1 Temuan mengenai pentingnya pemahaman politik menunjukkan

bahwa literasi mengenai pemilu perlu menjadi bagian integral dari

kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Hal ini berdampak pada

perlunya pengembangan materi ajar yang lebih kontekstual dan

aplikatif agar siswa tidak hanya mengetahui prosedur formal

pemilu, tetapi juga memahami makna demokrasi secara substantif.

5.2.2 Keragaman minat politik siswa menjadi dasar bagi lembaga

pendidikan, penyelenggara pemilu, dan organisasi kepemudaan

untuk merancang pendekatan edukatif yang variatif. Dampaknya,

kegiatan sosialiasi politik harus bersifat diferensiatif dan

menyentuh berbagai lapisan minat siswa, dari yang pasif hingga

aktif.

5.2.3 Meskipun ada ketidakpercayaan terhadap lembaga politik, siswa

tetap menunjukkan niat untuk memilih. Hal ini berdampak pada

pentingnya pengembangan model pertisipasi politik kritis, di mana

Maulidina Qurrota A'yunina, 2025

ANALISIS KECENDERUNGAN PARTISIPASI POLITIK SISWA SMA SEBAGAI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN SUMEDANG (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 3 SUMEDANG)

remaja tidak hanya dilibatkan sebagai pemilih, tetapi juga diajak untuk menjadi pengawas aktif terhadap jalannya demokrasi.

- 5.2.4 Penurunan kepercayaan terhadap demokrasi yang berdampak pada apatisme politik mengisyaratkan perlunya pendekatan yang sistematis dalam membangun kembali kepercayaan siswa. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan demokrasi, peran media yang lebih mendidik, serta keterlibatan politisi muda yang lebih dekat dengan realitas generasi mereka.
- 5.2.5 Hasil yang menujukkan hubungan erat antara sikap toleransi dan partisipasi politik berdampak pada pentingnya pendidikan nilainilai kebhinekaan. Dengan mendorong interaksi lintas budaya dan suku di lingkungan sekolah, siswa akan lebih terbuka dalam menerima perbedaan dan tergerak untuk aktif dalam proses politik yang inklusif dan demokratis.
- 5.2.6 Penyelenggara pemilu seperti KPU serta pembuat kebijakan bidang pendidikan dapat memanfaatkan hasil ini sebagai landasan untuk merancang program khusus yang menargetkan pemilih pemula, dengan pendekatan yang berbasis data dan kebutuhan aktual generasi muda.
- 5.2.7 Temuan ini mengindikasikan perlunya sinergi antara sekolah, keluarga, media, dan lembaga negara dalam menyampaikan pendidikan politik yang membumi. Dampaknya, kolaborasi ini bisa menjadi kekuatan sosial dalam membangun generasi muda yang sadar hak, kritis, dan toleran secara politik.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, terdapat sejumlah rekomendasi penting yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak terkait terutama dalam upaya meningkatkan partisipasi politik siswa. Yaitu sebagai berikut:

5.3.1 Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU perlu merancang program sosialisasi pemilu yang tidak hanya menekankan aspek teknis pemilihan, tetapi juga mengangkat nilai-nilai toleransi dan inklusivitas. Pendekatan yang berbasis keberagaman dapat memperluas jangkauan pesan demokrasi dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula secara bermakna.

5.3.2 Bagi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan

Kurikulum PPKn di tingkat pendidikan menengah harus lebih menekankan pada pendidikan karakter yang mencakup toleransi, pluralisme, dan partisipasi politik. Materi pembelajaran perlu dirancang secara kontekstual agar siswa tidak hanya memahami demokrasi secara teoritis, tetapi juga mampu menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari.

5.3.3 Bagi Sekolah

Sekolah sebagai lingkungan sosial utama siswa perlu menciptakan budaya sekolah yang menjunjung tinggi keberagaman dan membina iklim demokratis. Program ekstrakurikuler dan kegiatan lintas budaya dapat menjadi sarana untuk memperkuat interaksi positif antar siswa dari latar belakang berbeda.

5.3.4 Bagi Guru

Guru perlu berperan aktif sebagai fasilisator nilai-nilai toleransi dan demokrasi dalam proses pembelajaran. Mereka dapat mengintegrasikan diskusi kritis, simulasi pemilu, dan studi kasus ke dalam metode pengajaran untuk mendorong partisipasi aktif dan kesadaran politik siswa.

5.3.5 Bagi Peserta Didik

Siswa perlu memanfaatkan ruang-ruang diskusi dan pembelajaran politik untuk memperluas wawasan, mengembangkan sikap toleran terhadap perbedaan, dan membangun kepercayaan terhadap sistem demokrasi melalui keterlibatan yang konstruktif dan informatif.

5.3.6 Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini membuka ruang untuk eksplorasi yang lebih mendalam terkait faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi partisipasi politik siswa, seperti pengaruh media sosial, peran keluarga, atau lingkungan sekolah secara lebih spesifik. Selain itu, pendekatan kualitatif atau campuran (mixed method) juga dapat digunakan untuk menangkap nuansa sikap dan pengalaman subjektif siswa yang tidak sepenuhnya tergambarkan melalui data kuantitatif. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasi lebih luas, serta mempertimbangkan segmentasi demografis seperti jenis kelamin, latar belakang sosial, atau akses informasi politik. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika partisipasi politik generasi muda dalam konteks yang terus berubah.